**ABSTRAK**

Permasalahan pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam menjadi latar belakang bertambahnya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia yang pada akhirnya memunculkan usaha sektor informal atau bisa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kabupaten Ketapang merupakan merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang dimana juga mengalami permasalahan atas keberadaan pedagang kaki lima. Berdasarkan dari kondisi dan keadaan tersebut, maka penulis melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitian pada penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang sebagai penegak Peraturan Daerah dalam penertiban dan penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Ketapang serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi beserta upaya-upaya penyelesaian dan penanggulangan terhadap pedagang kaki lima.

Laporan Akhir ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif yang diamana merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi lapangan penelitian dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Untuk menganalisis data hasil dari pelaksanaan penelitian penulis menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Soekanto (2012) dan penedekatan legalistik Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Penertiban dan penerapan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang secara umum sudah berjalan dengan baik tetapi belum dikatakan efektif dan masih memiliki hambatan baik itu hambatan internal maupun hambatan eksternal. Mengacu kepada permasalahan dan hasil analisis data maka saran yang penulis berikan yaitu agar Pemerintah Daerah untuk secepatnya menangani pembinaan dan lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi agar menimbulkan efek jera bagi Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : Peranan, Penertiban dan Penerapan Sanksi